

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan perekonomian pada dewasa ini sudah mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang signifikan, hal ini terlihat dari pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, namun dibalik itu tetap ada kesenjangan perekonomian yang memiliki dampak pada keadaan perekonomian dari suatu golongan atau kelompok masyarakat umum. Akibat yang timbul dari kesenjangan inilah secara umum dikenal dengan kemiskinan (*poverty*).

Belum ada pengertian yang jelas terkait kemiskinan ini, jadi keadaan seperti ini merupakan salah satu masalah utama dalam perekonomian, kemiskinan juga merupakan masalah lama yang masih belum memiliki pemecahan masalah yang jelas dan tepat, karena secara umum, gambaran dari ukuran kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah tertentu juga diukur melalui kemiskinan, oleh karena itu persentase dari jumlah masyarakat miskin merupakan suatu hal yang menjadi persoalan di berbagai negara, terutama negara-negara berkembang tetapi bukan berarti bahwa kemiskinan tidak terjadi di negara berkembang.

Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup.¹

¹) Nano Prawoto,” Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya”, dalam **Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan**, Volume 9, (No.01) 2009; hal. 56. Tersedia : www.Id.portalgaruda.org. Diakses pada 25 Januari 2018.

Pada dasarnya, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam mengukur kemiskinan suatu daerah, seperti tingkat kesehatan, partisipasi penduduk dalam pendidikan, jumlah pendapatan, dan tingkat konsumsi dari masyarakat, selain daripada itu banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kemiskinan pada suatu wilayah tertentu. Untuk beberapa keadaan, kemiskinan ini dapat diatasi dengan dua metode dasar, yaitu mengurangi jumlah konsumsi rumah tangga dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Provinsi Sumatera Utara (provsu), sejak dikembangkannya fokus konsentrasi terhadap pariwisata Sumut hingga melahirkan Badan Otorita Danau Toba (BODT) yang bertugas untuk mengatur dan memantau keadaan pariwisata Danau Toba, sehingga provinsi ini terus mengembangkan pola-pola peningkatan sarana dan prasarana wilayahnya, angka jumlah total dari masyarakat miskin pun terus dikurangi, sebagai upaya dalam peningkatan laju pertumbuhan dan arus perekonomian masyarakat pada wilayah tersebut.

Pada Tabel 1 jelas terlihat bahwa jumlah dari penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba selalu mengalami peningkatan maupun penurunan atau istilah lain dapat dikatakan mengalami fluktuasi pada jumlah total keseluruhannya.

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Miskin di Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba Periode Tahun 2010-2015 (jiwa)

Tahun	Kabupaten						
	Tobasa	Samosir	Humbahas	Taput	Dairi	Karo	Simalungun
2010	17.6	19.7	18.2	34.9	26.9	38.7	87.7
2011	16.93	18.95	17.5	33.57	25.87	37.22	84.35
2012	16.64	18.4	17.25	33.09	25.49	36.71	83.09
2013	16.96	17.18	17.94	33.75	24	36.93	87.72
2014	16.51	16.27	17.14	32.23	23.35	35.36	86.25
2015	18.31	17.64	18.14	33.37	25.33	37.52	92.89

Sumber : www.bps.sumut.go.id

Oleh karena itu, jumlah penduduk miskin inilah yang harus dikurangi, terlebih lagi dalam peningkatan kontribusi lapangan usaha pariwisata yang termasuk dalam Otorita Danau Toba yaitu Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Simalungun kedepannya diharapkan mampu memberikan sumbangan yang besar dalam mengurangi kemiskinan pada suatu wilayah tertentu.

Pada praktiknya, ada beberapa hal diantaranya yang mempengaruhi jumlah kemiskinan pada tujuh kabupaten Danau Toba seperti Penanaman Modal Dalam Negeri, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Semakin tinggi jumlah penanaman modal dalam negeri dan sumbangan dari pendapatan PDRB yang ditanamkan ataupun yang dimiliki pada wilayah tertentu maka tingkat pembangunan dari sarana dan prasarana diharapkan juga akan meningkat, kemudian juga jika indeks pengangguran pada wilayah tertentu tersebut berkurang maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Tabel 2. Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri di Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba Periode Tahun 2010-2015 (Rupiah)

Tahun	Kabupaten						
	Tobasa	Samosir	Humbahas	Taput	Dairi	Karo	Simalungun
2010	448.615.951	108.962.084	152.910.254	409.470.192	254.412.862	720.161.902	1.018.775.568
2011	152.864.148	248.949.965	193.581.464	293.544.101	500.463.218	825.788.001	1.177.272.938
2012	379.946.090	460.772.569	246.820.136	254.220.114	672.402.306	813.796.954	1.408.013.222
2013	334.080.502	955.423.680	279.863.185	557.602.439	822.971.217	809.298.205	1.446.181.335
2014	475.9.71.159	1.002.577.559	338.837.279	440.369.919	824.295.226	815.463.186	1.478.391.043
2015	580.900.970	1.203.568.305	441.936.382	687.497.550	848.219.516	819.199.115	1.642.874.931

Sumber : www.sumut.bps.go.id

Dari Tabel 2 jelas terlihat bahwa jumlah PMDN di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba telah mengalami peningkatan kecuali di Kabupaten Toba Samosir yang mengalami fluktuasi secara keseluruhan, peningkatan PMDN tersebut akan mendorong pembangunan yang pada

gilirannya akan mengurangi pengangguran tenaga kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Tabel 3. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba Periode Tahun 2005-2015 (Rupiah)

Tahun	Kabupaten						
	Tobasa	Samosir	Humbahas	Taput	Dairi	Karo	Simalungun
2010	10.176.988	8.846.290	5.864.032	5.780.955	7.593.589	9.594.214	6.812.974
2011	10.601.507	9.283.833	6.106.829	6.020.912	7.919.187	9.959.126	7.133.594
2012	22.627.824,46	17.314.335,31	16.678.319,99	14.689.627,65	17.034.206,17	27.883.731,14	22.970.279,16
2013	23.550.243,38	18.245.050,23	17.238.437,39	15.323.719,27	17.778.153,36	28.678.550,63	24.003.497,91
2014	24.390.834,08	19.234.572,44	17.987.409,54	15.960.468,78	18.567.328,70	29.570.664,27	25.110.727,97
2015	25.327.821,78	20.226.182,27	18.617.318,35	16.596.778,49	19.397.859,67	30.495.898,68	26.258.511,15

Sumber : www.sumut.bps.go.id

Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa PDRB per kapita di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba pada tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2015 nilai PDRB per kapita terbesar adalah kabupaten Karo dengan angka 30.495.898,68 rupiah, sedangkan nilai PDRB per kapita terendah pada tahun 2015 adalah kabupaten Tapanuli Utara dengan angka 16.596.778,49 rupiah

Tabel 4. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Tujuh Kabupaten kawasan Danau Toba Periode Tahun 2011-2015 (%)

Tahun	Kabupaten						
	Tobasa	Samosir	Humbang	Taput	Dairi	Karo	Simalungun
2010	2,56	0,55	0,69	2,26	2,06	1,55	6,43
2011	2,35	2,26	3,56	3,85	2,60	4,46	4,62
2012	1,98	1,31	0,35	2,27	1,43	2,00	5,41
2013	1,69	1,12	0,30	2,34	1,90	2,08	5,56
2014	0,73	1,05	0,36	0,59	1,50	1,02	7,48
2015	3,47	1,28	1,22	2,56	1,26	2,23	5,75

Sumber : www.sumut.bps.go.id

Data Tabel 4 menunjukkan pada tahun 2010 tingkat pengangguran paling tinggi di Kabupaten Simalungun, yaitu sebesar 6,43% dari total jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran paling rendah di Kabupaten Samosir, yaitu sebesar 0,55 %. Pada tahun 2015

tingkat pengangguran paling tinggi di Kabupaten Simalungun yaitu sebesar 5,75 % dan tingkat pengangguran yang paling rendah di Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu sebesar 1.22%.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimanakah Penanaman Modal Dalam Negeri, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat memberikan dampak positif bagi pengurangan jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, PDRB Per Kapita dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba Periode Tahun 2005-2015”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode Tahun 2005-2015 ?
2. Bagaimanakah pengaruh PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode Tahun 2005-2015 ?
3. Bagaimanakah pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode Tahun 2005-2015 ?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari penanaman modal dalam negeri terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode 2005-2015.

2. Untuk mengetahui pengaruh dari PDRB Per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode 2005-2015 ?
3. Untuk mengetahui pengaruh dari pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba periode Tahun 2005-2015 ?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan berlatih bagi penulis untuk mempraktikkan apa yang telah penulis pelajari selama masa studi di Universitas.
2. Sebagai bahan literasi referensi tambahan terkait judul penelitian yang dilakukan oleh penulis.
3. Sebagai bahan referensi dan literasi terhadap penelitian lanjutan yang mungkin dikerjakan orang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penanaman Modal Dalam Negeri

Investasi merupakan akumulasi dari penanaman modal yang diharapkan memberikan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, sumbangan pendapatan yang didapat dari investasi diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi. Untuk mencapai tujuan pokok dari salah satu pembangunan adalah bagaimana memperluas kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan hal itu, maka diperlukan peningkatan sumber-sumber pembiayaan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Untuk teori pendapatan daerah, investasi adalah seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri dan pertambahan dalam nilai stok barang perusahaan yang berupa bahan mentah, barang belum diproses, dan barang jadi.

Pertama, yang dimaksud dalam hal ini termasuk akumulasi modal baru dapat berbentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kedua, perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya. Ketiga, kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (*output*) dan pendapatan di kemudian hari.

Peningkatan produksi nasional dapat terjadi karena adanya akumulasi modal yang diperoleh dari tabungan nasional yang nantinya akan digunakan untuk melakukan investasi. Tetapi sejak awal Pelita I, pemerintah telah merasakan adanya keterbatasan dana yang dapat dikerahkan pemerintah melalui tabungan pemerintah. Oleh karena itu kebutuhan investasi yang besar dalam rangka pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan industrialisasi diharapkan dapat diisi oleh dana masyarakat yang dapat dihimpun melalui tabungan masyarakat. Dari

akumulasi dana masyarakat inilah, diharapkan kebutuhan investasi yang dihadapi perekonomian Indonesia dapat terpenuhi.²

Untuk menghimpun dana tersebut maka dari itu diperlukan fokus pada tingkat pertumbuhan yang layak selaras dengan kecepatan pertumbuhan penduduk, maka pengerahan sumber-sumber dana dalam negeri dianggap belum cukup, sehingga masuknya modal asing swasta sangat diperlukan secara proaktif dalam rangka pengembangan strategi pembangunan nasional.

Secara umum, bahwa jenis investasi dikenal dengan dua jenis (bagian) besar, yaitu :

1. Penanaman Modal Asing

Pada jenis ini investasi diartikan sebagai himpunan modal yang datang dan dimiliki oleh pemodal-pemodal luar negeri, baik pemodal swasta (*private*) maupun dari pemodal kelembagaan yang melakukan kerjasama (*bilateral institutional*) dengan suatu negara atau lembaga lainnya di wilayah tertentu, pengembangan dan alokasi penggunaan modal investasi inilah yang diharapkan mampu meningkatkan proses pembangunan wilayah strategis daerah.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 1968 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang ini dengan “modal dalam negeri” adalah : bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan

²) Daru Wahyuni, “Perilaku Investasi di Indonesia: Kajian Jangka Pendek dan Jangka Panjang”, dalam **Jurnal Ekonomi dan Pendidikan** Volume 02 (No.01) 2004: hal.59. Tersedia: www.id.portalgaruda.org. Diakses tanggal 12 Desember 2017.

guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.

- b. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/ atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, yang dimaksud dalam undang-undang dengan "Penanaman Modal Dalam Negeri" ialah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan ketentuan Undang-Undang ini.

Penggunaan dari modal yang datang dari investasi digunakan untuk pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Artinya pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh.

Pada akhirnya investasi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan perkembangan dari pembangunan wilayah, namun dibalik itupun “ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi jumlah investasi wilayah, yaitu, inovasi dan teknologi, tingkat perekonomian, tingkat keuntungan perusahaan dan situasi politik”³

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

2.2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB Per Kapita)

³) Ni Putu Sucitrawati dan Sudarsana Arka, “Perilaku Investasi di Indonesia: Kajian Jangka Pendek dan Jangka Panjang”, dalam **Jurnal Ekonomi dan Pendidikan** Volume 02 (No.01) 2004: hal. 59. Tersedia : www.id.portalgaruda.org. Diakses tanggal 12 Desember 2017.

Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu perencanaan yang mantap sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang baik perlu menggunakan data-data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu sehingga kebijakan dan strategi yang telah atau akan diambil dapat dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Akumulasi dari jumlah pendapatan yang dimiliki suatu wilayah serta menggambarkan indeks laju pertumbuhan atau keadaan perekonomian dan disajikan dalam bentuk data-data secara ringkas diartikan sebagai Produk Domestik Bruto Per kapita.

Lebih lanjut lagi Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa :

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.⁴

Kemudian, Sadono Sukirno mengartikan bahwa :

Pertumbuhan sesuatu perekonomian diukur dari penambahan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang diproduksi. Untuk dapat menghitung kenaikan itu dari tahun ke tahun, barang dan jasa yang dihasilkan haruslah dihitung pada harga yang tetap, yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai

⁴) www.bps.go.id.

barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Nilai pendapatan nasional yang didapat dalam penghitungan secara ini dinamakan pendapatan nasional pada harga tetap atau pendapatan nasional riil.⁵

Dalam menjalankan proses pembangunan pada suatu daerah, untuk memenuhi percepatan dan pemenuhannya dibutuhkan akumulasi modal yang cukup demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), cara ini dapat dilakukan dengan beberapa fokus yang menjadi sasaran utama dalam pengembangan terkait hal tersebut, pada pengertian diatas jelas diketahui bahwa sajian data pendapatan yang dipaparkan dalam PDB akan mampu menjelaskan kondisi perekonomian suatu wilayah dengan jelas.

Untuk cakupan dan kajian daerah (*regional*) nilai PDB lebih dikenal sebagai, Produk Domestik Regional Bruto Per kapita (PDRB per kapita). Pada awalnya Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan suatu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pencapaian pembangunan yang lebih baik, dimana apabila Produk Domestik Regional Bruto perkapita daerah tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan maka dapatlah dikatakan bahwa roda pembangunan daerah tersebut sangat baik karena Produk Domestik Regional Bruto per kapita yang memaparkan gambaran angka yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas serta penurunan kemiskinan. Karena pada dasarnya salah satunya cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan meningkatkan jumlah sumbangan pendapatan yang di uraikan pada data Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB per kapita) untuk setiap wilayah tertentu.

Salah satu data yang tersaji adalah data PDRB per kapita, data tersebut dapat jelas menggambarkan bagaimana jumlah pendapatan total dari masyarakat untuk setiap wilayah, jumlah total PDRB per kapita suatu wilayah akan dibagi dengan jumlah total penduduk di

⁵) Sadono Sukirno, **Makroekonomi: Teori Pengantar**, Edisi Ketiga, Cetakan Kesembilanbelas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 36.

wilayah tersebut, data hasilnya inilah yang dinyatakan sebagai PDRB per kapita. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa gambaran dari jumlah akumulasi pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah disajikan dalam data PDRB per kapita, uraian yang dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Walaupun begitu, sumbangan yang dihasilkan dari besaran PDRB per kapita masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi lainnya dari daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB perkapita bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

2.3. Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, pengangguran (*unemployment*) diartikan sebagai seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya jumlah pengangguran, dengan jumlah penduduk miskin. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, kondisi ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah penduduk miskin yang ada, sehingga menurunkan indeks kesejahteraan rakyat.

Satu aspek dalam kinerja ekonomi adalah seberapa efektif suatu perekonomian menggunakan sumber daya dengan baik. Karena para pekerja suatu perekonomian adalah sumber daya utama, menjaga agar para pekerja tetap bekerja agar menjadi puncak perhatian para pembuat

kebijakan ekonomi. Tingkat pengangguran adalah statistik yang mengukur persentase orang-orang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan.⁶

Jadi jelas diketahui bahwa salah satu nilai atau indeks yang menunjukkan kinerja ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh tingkat pengangguran dalam wilayah itu sendiri, semakin tinggi angka penganggurannya akan menurunkan kinerja ekonomi.

Dari kaca mata pemerintah pengangguran adalah “beban ekonomi” dan suatu perekonomian yang mempunyai banyak tentu saja harus menyediakan dana besar untuk menghidupi mereka. Di Indonesia dan banyak negara berkembang lain, kesempatan kerja yang lebih besar adalah kesempatan kerja mandiri (*selfemployment*) bukan kesempatan kerja dengan upah (*wage-employment*). Jika masalah kesempatan kerja ini dilihat sebagai masalah pengangguran seperti di negara-negara industri (dan teori yang sudah tersedia memang hanya itu), maka pemecahannya adalah dengan pemberian iklim yang baik bagi pengembangan usaha, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan lapangan kerja, atau dengan bahasa teori ekonomi Neoklasik “menyerap tenaga kerja” (*labor absorption*).⁷

2.3.1. Jenis Pengangguran

Macam macam pengangguran dapat dibedakan yaitu sebagai berikut :

1. Pengangguran Tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

2. Pengangguran Musiman

Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

3. Setengah Menganggur

⁶) N.Gregory Mankiw, **Makroekonomi**, Edisi Keenam, Terjemahan Fitria Liza dan Imam Nurmawan, Jakarta : Erlangga, 2006, hal. 34.

⁷) Purwanto, “Menanggulangi Masalah Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi”, dalam **Jurnal Ekonomi dan Pendidikan** Volume 02 (No.03), 2005: hal. 88. Tersedia : www.id.portalgaruda.org. Diakses tanggal 12 Desember 2017.

Keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu termasuk dalam golongan setengah menganggur.

4. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

2.4. Kemiskinan

2.4.1. Pengertian Kemiskinan

Fenomena dan permasalahan terkait kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang sering dihadapi oleh suatu negara, terutama di negara dunia ketiga. Masalah kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun dari ukurannya. Hal ini disebabkan kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan menyangkut seluruh dimensi kebutuhan manusia yang sifatnya beragam. Selain itu, dimensi kebutuhan manusia yang beraneka ragam itupun saling terkait satu dengan lainnya. Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang ada, maka dibutuhkan faktor produksi, yang dalam hal ini diartikan sebagai sumber daya yang mencakup konsep ekonomi luas dan tidak hanya pengertian finansial, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alasan dan penyebab terjadinya kemiskinan secara konsep ekonomi kita kenal akibat dari tidak meratanya distribusi pendapatan yang mengakibatkan ketimpangan (*gap*), kondisi inilah yang memancing juga keadaan kemiskinan dari setiap wilayah atau daerah semakin bervariasi.

Variasi dalam perubahan kemiskinan antar provinsi ini disebabkan oleh perbedaan antar provinsi dalam banyak hal, seperti laju pertumbuhan ekonomi (rendah atau tinggi) dan sifatnya (apakah padat tenaga kerja yang berarti pertumbuhan ekonomi menciptakan banyak kesempatan kerja baru atau padat modal yang berarti laju pertumbuhan kesempatan kerja lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi), struktur ekonomi (apakah ekonomi masih bersifat agraris atau didominasi oleh sektor non-primer, khususnya industri manufaktur yang merupakan sektor terbesar dalam menyumbang nilai tambah terhadap ekonomi), kondisi infarastruktur (kuantitatif maupun kualitatif), besarnya dampak dari krisis tersebut terhadap provinsi bersangkutan (ditentukan antara lain oleh keterbukaan ekonomi dari provinsi yang bersangkutan terhadap ekonomi wilayah yang lebih luas atau internasional dan kesiapan provinsi tersebut terhadap suatu guncangan ekonomi).⁸

Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan terkait ketimpangan terhadap pendapatan yang mampu mempengaruhi kemiskinan ini, diharapkan bahwa seluruh lapangan usaha dapat berkontribusi maksimal dalam pengembangan dan peningkatan kondisi perekonomian wilayah.

Kemiskinan juga dipandang sebagai permasalahan yang sulit diatasi, sebab jika indeks dan jumlah kemiskinan wilayah semakin meningkat maka secara tidak langsung dapat diketahui bahwa hal ini akan mempengaruhi kinerja perekonomian suatu wilayah.

2.4.2. Indikator Kemiskinan

Untuk dapat mengetahui tingkat kemiskinan suatu wilayah tertentu, maka dibutuhkan indikator yang dapat menjelaskan batasan-batas mengenai kemiskinan. Pengukuran batas kemiskinan menurut perhitungan Biro Pusat Statistik (BPS) batas kemiskinan dihitung dari

⁸) Tulus T.H. Tambunan, **Perekonomian Indonesia Kajian Teoretis dan Analisis Empiris**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012, hal. 192.

besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan). Kebutuhan makan digunakan ukuran/standar 2100 kalori per hari. Ekuivalensinya menurut BPS sama dengan pendapatan sekitar Rp 350.000,00 per bulan untuk warga perkotaan dan pendapatan sebesar Rp 240.000,00 per bulan untuk warga pedesaan. Atau dalam ukuran internasional adalah US\$ 2 per hari warga perkotaan dan US\$ 1 per hari bagi warga pedesaan.

2.4.3. Jenis Kemiskinan

Penyebab terjadinya kemiskinan sangat beragam, tetapi kemiskinan sendiri dibagi atas dua bagian besar, yaitu :

a. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang merasa cepat puas akan sesuatu yang telah dicapai, sifat bermalasan dan cara berpikir masyarakat yang kurang rasional dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan pada masyarakat kelompok ini. kemiskinan kultural atau ada beberapa ahli yang menyebut dengan budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan pada suatu kelompok masyarakat sebagai suatu kondisi dalam suatu kelompok masyarakat yang menurut pandangan kelompok masyarakat lain kondisinya sangat miskin serba kekurangan dan perlu pertolongan segera, namun kelompok masyarakat itu sendiri merasa biasa-biasa saja bahkan "enjoy" dengan keadaannya. Hal inilah yang menyebabkan pihak-pihak lain atau kita akan kesulitan untuk mengetaskan kemiskinan pada kelompok ini.

b. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam yang kurang menguntungkan sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mencapai kesejahteraan. Kondisi alam yang kurang menguntungkan berupa tanah tandus, letak daerah yang terpencil, tidak adanya sumber daya mineral dan non mineral, serta miskinnya fasilitas-fasilitas publik yang dibutuhkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, dimana masing-masing faktor saling berkaitan dan memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas). Rendahnya kualitas sumber daya manusia mengakibatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rendah pula yang selanjutnya mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas masyarakat. Rendahnya produktivitas akan berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat sehingga akumulasi tabungan masyarakat juga akan rendah. Kondisi ini akan

berakibat pada rendahnya investasi produktif karena sebagian dana yang digunakan untuk investasi diperoleh dari tabungan masyarakat yang pada gilirannya kembali mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia.⁹

Fenomena kemiskinan akan berdampak bagi arus perekonomian dan tatanan kebutuhan masyarakat, namun walaupun begitu ada ada pula masalah yang perlu dibahas terkait kemiskinan,

Selain tingkat kemiskinan, ada dua hal lain yang juga harus diperhatikan dalam membahas soal kemiskinan di Indonesia, yakni kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Kedalaman kemiskinan menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin, terhadap batas miskin (garis kemiskinan yang berlaku), sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran dari penduduk paling miskin, atau yang makin jatuh dibawah garis kemiskinan yang berlaku.¹⁰

Setelah mengetahui besaran dan tingkat keparahan kemiskinan, perlu adanya penanggulangan yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah tertentu.

2.5. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan skripsi ini antara lain.

1. Penelitian Anggit Yoga Permana dengan judul : “ Analisis pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa:
 - a. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.**
 - b. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.**
 - c. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.**

⁹) Supriyanto, “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan”, dalam **Jurnal Ekonomi dan Pendidikan** Volume 03 (No.01), 2006 :hal.1. Tersedia : www.id.portalgaruda.org. Diakses tanggal 12 Desember 2017.

¹⁰) Tulus T.H. Tambunan, **Op. Cit**, hal.193.

- d. Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.¹¹**
2. Penelitian Wijayanto dengan judul : “Analisis pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa:
- a. PDRB berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.**
 - b. Pendidikan yang tercermin dari besarnya tingkat melek huruf memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.**
 - c. Pengangguran berdasarkan hasil penelitian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.¹²**
3. Penelitian Sukmaraga dengan judul : “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa:
- a. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.**
 - b. PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.**
 - c. Jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.¹³**

2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini ada tiga variabel pembangunan ekonomi, antara lain Penanaman Modal Dalam Negeri, PDRB per kapita, dan pengangguran terbuka. Penanaman Modal Dalam Negeri yang terdata dan berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) dimana arus

¹¹⁾ Anggit Yoga Permana, **Analisis pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009**. Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2012 (Skripsi tidak diterbitkan)

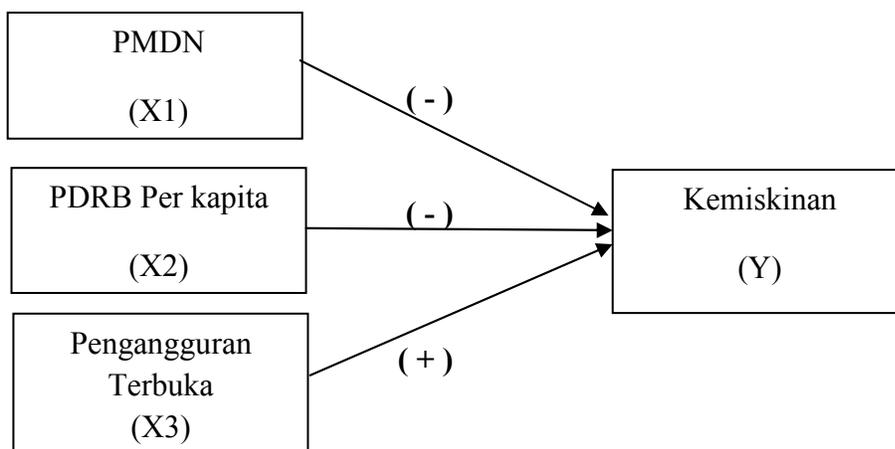
¹²⁾ Wijayanto, **Analisis pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008**. Semarang : Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, 2010 hal 97 (Skripsi tidak diterbitkan)

¹³⁾ Sukmaraga, **Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun**. Semarang : Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, 2011 hal 51 (Skripsi tidak diterbitkan)

modal yang dihimpun tersebut berasal dari masyarakat. PDRB per kapita adalah nilai total PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah keseluruhan penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu struktur perekonomian dalam penyediaan lapangan pekerjaan, lalu penggunaan data tersebut akan sangat berpengaruh pada distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga variabel tersebut merupakan variabel independen, bersama-sama dengan jumlah penduduk miskin sebagai variabel dependen akan diregresikan untuk mendapatkan tingkat signifikansinya. Dengan hasil regresi tersebut diharapkan mendapatkan tingkat signifikansi setiap variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variabel independen tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait mengenai penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten Provinsi Sumatera Utara untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam upaya pengentasan dan menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Secara skema, kerangka pemikiran dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya jika Penanaman Modal Dalam Negeri Negeri naik satu satuan maka kemiskinan akan

turun satu satuan. Untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap kemiskinan, hal ini diartikan sebagai keadaan dimana jika nilai PDRB naik satu satuan maka kemiskinan akan turun satu satuan. Kemudian hingga pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang berpengaruh positif terhadap kemiskinan, artinya jika TPT naik satu satuan maka akan menaikkan angka kemiskinan satu satuan.

2.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba Periode 2005-2015.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba Periode 2005-2015.
3. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Tujuh Kabupaten Kawasan Danau Toba Periode 2005-2015.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba, dengan menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, PDRB per kapita, dan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba untuk mengetahui jumlah penduduk miskin setelah ketujuh kabupaten tersebut di jadikan sebagai Badan Otorita Danau Toba (BODT).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang bersumber dari BPS. Data yang dibutuhkan antara lain:

1. Data jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba tahun 2005-2015
2. Data total Penanaman Modal Dalam Negeri di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba tahun 2005-2015.
3. Data PDRB per kapita atas dasar harga konstan dan harga berlaku di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba tahun 2005-2015.
4. Data tingkat pengangguran terbuka di tujuh kabupaten kawasan Danau Toba tahun 2005-2015.

Adapun sumber data diperoleh dari:

1. Data jumlah penduduk miskin di tujuh kabupaten Danau Toba tahun 2005-2015, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Sumatera Utara Dalam Angka”.

2. Data penanaman modal dalam negeri di tujuh kabupaten Danau Toba tahun 2005-2015, yaitu dari Badan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumut dan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Sumatera Utara Dalam Angka”.
3. Data PDRB perkapita atas dasar harga konstan di tujuh Kabupaten Danau Toba tahun 2005-2015, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Sumatera Utara Dalam Angka”.
4. Data tingkat pengangguran terbuka di tujuh kabupaten Danau Toba tahun 2005-2015, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Sumatera Utara Dalam Angka”.

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Periode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2005–2015. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, serta dari *browsing website internet* yang terkait dengan masalah kemiskinan.

3.3. Metode Analisis

3.3.1. Metode Analisis Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis data panel (*pooling data*). Analisis dengan menggunakan data panel adalah kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan kerat lintang (*cross section*), dimana :

***Time series* adalah data yang terdiri dari suatu objek namun terdiri dari beberapa waktu periode, seperti harian, bulanan, triwulanan, dan tahunan. Dan *Cross section* adalah data yang terdiri dari suatu objek namun memerlukan sub objek-sub objek lainnya yang berkaitan atau yang berada di dalam objek induk tersebut pada suatu waktu.¹⁴**

¹⁴http://elsimhfeb11.web.unair.ac.id/artikel_detail121077StatistikPenelitianPerbedaanDataTimeSeries,DataCrossSection,danDataPanel.html

3.4. Model Regresi Data Panel

Untuk mengestimasi model data panel dapat menggunakan beberapa model penelitian yaitu dengan menggunakan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

3.4.1. *Common Effect Model (CEM) atau Pooled Regression Model.*

“Model *common effect* menggabungkan seluruh data *cross section* dan *time series* dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut.”¹⁵⁾. Metode OLS (*Ordinary Least Square*) merupakan salah satu metode populer untuk menduga nilai parameter dalam persamaan regresi linear. Secara umum, persamaan modelnya dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_{it}; t = 1, 2, 3, \dots, T; i = 1, 2, 3, \dots, N$$

Dengan arti :

- Y_{it} = Jumlah penduduk miskin (juta jiwa).
- X_{1it} = Jumlah PMDN (juta rupiah).
- X_{2it} = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (juta rupiah).
- X_{3it} = Pengangguran (persen).
- β_0 = Intersep dari model
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = *Slope* atau koefisien variabel independen
- u_{it} = Galat atau *term of error* pada unit observasi ke-*i* dan waktu ke-*t*

3.4.2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Salah satu kesulitan data panel adalah asumsi bahwa intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk menghasilkan hal tersebut, yang dilakukan data panel adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*). “Pendekatan ini mengizinkan *intercept* bervariasi antar unit *cross-section* namun tetap mengasumsikan bahwa slope koefisien adalah

¹⁵⁾ <http://www.diassatria.com/analisis-regresi-model-data-panel/>

konstan antar unit *cross-section*¹⁶ Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebuah model efek tetap (*Fixed Effect Model*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)* model.

Model peubah *Dummy* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_{it}$$

$$Y = f(X, D_2, D_3, D_4, \dots, D_{15})$$

Dimana :

Y = Jumlah penduduk miskin (jiwa)

X₁ = Jumlah PMDN (rupiah).

X₂ = Produk Domestik Regional Bruto per kapita (rupiah).

X₃ = Pengangguran (persen).

i = Unit *cross section*

t = Unit time series

α = Konstanta

β = Koefisien

u = Galat

Benchmark data lintas individu: Simalungun

a. Lintas waktu:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_2 D_{2006} + \alpha_3 D_{2007} + \alpha_4 D_{2008} + \alpha_5 D_{2009} + \dots + \alpha_6 D_{2015} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + U_{it}$$

b. Lintas individu :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 D_{4i} + \alpha_5 D_{5i} + \alpha_6 D_6 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_{it}$$

dimana :

¹⁶<http://research-indonesia.blogspot.co.id/2012/02/model-pengambilan-keputusan-dalam-panel.html? M=1>

- D₁ = 1, jika pengamatan Kabupaten Toba Samosir
= 0, selainnya
- D₂ = 1, jika pengamatan Kabupaten Samosir
= 0, selainnya
- D₃ = 1, jika pengamatan Kabupaten Humbang Hasundutan
= 0, selainnya
- D₄ = 1, jika pengamatan Kabupaten Tapanuli Utara
= 0, selainnya
- D₅ = 1, jika pengamatan Kabupaten Dairi
= 0, selainnya
- D₆ = 1, jika pengamatan Kabupaten Karo
= 0, selainnya

Adapun akibat penggunaan dari *Fixed Effect Model*, atau model *LSDV* yaitu:

- Jika menggunakan begitu banyak peubah boneka, maka kemungkinan akan kehilangan banyak derajat bebas.
- Dengan variabel yang begitu banyak, ada kemungkinan terjadinya multikolinearitas.
- Harus memperhatikan dengan hati-hati galat u_{it} pada asumsi bahwa $u_{it} \sim N(0, \sigma^2)$. Karena indeks i menyatakan pengamatan lintas individu dan t menyatakan pengamatan lintas waktu, asumsi klasik harus dimodifikasi.

3.4.3. Model Efek Acak (*Random Effect Model*)

Menurut Saputra :

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*Fixed Effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*Trade Off*). Penambahan variabel boneka ini akan mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*Degrees Of Freedom*) yang pada akhirnya akan

mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model data panel yang didalamnya melibatkan korelasi antar *error term* karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (*Error Component Model*) atau disebut juga model efek acak (*Random Effect*).¹⁷⁾

Adapun model yang digunakan dalam estimasi terhadap data panel yaitu :

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_{it}$$

dimana :

Y_{it} = Jumlah penduduk miskin (jiwa).

X_{1it} = Jumlah PMDN (rupiah).

X_{2it} = Produk Domestik Regional Bruto per kapita (rupiah).

X_{3it} = Pengangguran terbuka (persen).

β_0 = Intersep dari model

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = *Slope* atau koefisien variabel independen

u_{it} = Galat atau *term of error* pada unit observasi ke-*i* dan waktu ke-*t*

3.5. Pemilihan Model Terbaik Estimasi Regresi Data Panel

3.5.1. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (*Random Effect Model*) dengan model efek tetap (*Fixed Effect Model*). Uji ini bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antara galat pada model (*galat komposit*) dengan satu atau lebih variabel penjelas (*independen*) dalam model. Hipotesis awalnya adalah tidak terdapat hubungan antara galat model dengan satu atau lebih variabel penjelas. Dalam perhitungan statistik Uji Hausman diperlukan asumsi bahwa banyaknya kategori *cross-section* lebih besar dibandingkan jumlah variabel independen termasuk

¹⁷⁾ Whisnu Adhi Saputra. “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah”, Jawa Tengah : Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, 2011, hal. 65 (Skripsi tidak diterbitkan)

konstanta dalam model. Lebih lanjut, dalam estimasi statistik *Uji Hausman* diperlukan estimasi variansi *cross-section* yang positif, yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh model. Apabila kondisi-kondisi ini tidak dipenuhi maka hanya dapat digunakan model *Fixed Effect*. Akan tetapi apabila dalam hasil *Uji Chow* model terbaik adalah *Common Effect* model maka *Uji Hausman* tidak perlu dilakukan.

3.5.2. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara model efek tetap (*Fixed Effect Model*) dengan model koefisien tetap (*Common Effect Model*).

H_0 : Model *Common Effects* lebih baik dari pada *Fixed Effects*

H_1 : Model *Fixed Effects* lebih baik dari pada *Common Effects*

Statistik uji yang digunakan merupakan uji F, yaitu :

$$F = \frac{(R^2_{\text{new}} - R^2_{\text{old}}) / df}{(1 - R^2_{\text{new}}) / df} = \frac{(R^2_{\text{new}} - R^2_{\text{old}}) / m}{(1 - R^2_{\text{new}}) / n - k}$$

m = banyaknya peubah bebas (regresor yang baru)

k = jumlah parameter dalam model yang baru

n = jumlah pengamatan

3.6. Pengujian Statistik

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatar belakangi pengujian signifikansi adalah Uji statistik (*estimator*) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada. Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi secara simultan (*Uji-F*), pengujian koefisien regresi secara individu (*Uji-t*), dan pengujian determinasi *Goodness of fit test* (R^2).

3.6.1. Uji Secara Individu (*Uji-t*)

Uji signifikansi parameter individu (*Uji-t*) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan.

Rumus untuk mencari t_{hitung} adalah :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\hat{\beta}_i - \beta_i}{S(\hat{\beta}_i)} ; i = 1,2,3$$

$\hat{\beta}_i$: Koefisien regresi

β_i : Parameter

$S(\hat{\beta}_i)$: Simpangan baku

Hipotesis yang digunakan:

1. Variabel bebas X_1 : PMDN

$H_0 : \beta_1 = 0$ tidak ada pengaruh variabel PMDN terhadap jumlah penduduk miskin.

$H_1 : \beta_1 < 0$ ada pengaruh negatif PMDN terhadap jumlah penduduk miskin.

2. Variabel bebas X_2 : PDRB per kapita.

$H_0 : \beta_2 = 0$ tidak ada pengaruh variabel PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin.

$H_1 : \beta_2 < 0$ ada pengaruh negatif variabel PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin.

3. Variabel bebas X_3 : Tingkat pengangguran.

$H_0 : \beta_3 = 0$ tidak ada pengaruh variabel tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin.

$H_1 : \beta_3 > 0$ ada pengaruh positif variabel tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin.

3.6.2. Uji Secara Simultan (Uji-F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variable-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai $F_{tabel} > F_{hitung}$ maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Pada tingkat signifikansi 5% kriteria pengujian digunakan sebagai berikut :

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, yang artinya variabel secara serentak atau bersama sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3.6.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R^2 adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil (mendekati 0) berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen

sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1, berarti variabel-variabel bebas (independen) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memberikan keragaman variabel terikat.

Rumus untuk mencari koefisien determinasi (R^2) adalah :

$$R^2 = \frac{JKR}{JKT} \times 100\%$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKT : Jumlah Kuadrat Total

Kelemahan mendasar penggunaan *Determinasi* adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggambarkan nilai *Adjusted R²* pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.

3.7. Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

3.7.1. Deteksi Normalitas

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan simetris tidaknya distribusi data. Uji normalitas akan dideteksi melalui analisa grafis yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. Uji normalitas menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas dan variabel terikat, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Menurut Arikunto bahwa:

Apabila dari penelitian sudah terkumpul data lengkap, maka untuk pengujian normalitas dilalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Membuat tabel distribusi frekuensi.**
- b. Menentukan batas nyata tiap-tiap kelas interval.**
- c. Mencari frekuensi kumulatif dan frekuensi kumulatif relatif (dalam persen).**

d. Dengan skala sumbu mendatar dan sumbu menegak, menggambarkan grafik dengan data yang ada, pada kertas probabilitas normal.¹⁸⁾

Uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit*, digunakan untuk mengetahui apakah distribusi nilai dalam sampel sesuai dengan distribusi teoritis tertentu, misalnya normalitas data. Normalitas dapat diketahui dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* pada *alpha* sebesar 5 %. Jika nilai signifikansi dari pengujian *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 berarti data normal.

3.7.2. Deteksi Multikolinieritas

Pada mulanya multikolinieritas berarti adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna atau pasti, diantara semua atau beberapa variabel yang menjelaskan dari model regresi. Tepatnya istilah multikolinieritas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear. Tetapi perbedaan ini jarang diperhatikan dalam praktek, dan multikolinieritas berkenaan dengan kedua kasus tadi. Multikolinieritas dalam penelitian ini dideteksi dengan melihat: Matrix koefisien antara masing masing variabel bebas. Kaidah yang digunakan adalah apabila koefisien korelasi antara dua variabel bebas lebih besar dari 0,8 maka kolinieritas merupakan masalah berganda merupakan masalah yang serius. Namun korelasi pasangan ini tidak memberikan informasi yang lebih baik dalam untuk hubungan yang rumit antara tiga atau lebih peubah.

3.7.3. Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila

¹⁸⁾ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik**, Edisi Revisi, Cetakan Ketigabelas, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal. 314.

variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien, cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *White Heteroscedasticity Standard Errors and Covariance* yang tersedia dalam program Eviews. Uji ini diterapkan pada hasil regresi yang menggunakan prosedur *equation* dan metode OLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dalam Uji ini adalah nilai F dan *Obs*Squared*, secara khusus adalah nilai *probability* dari *Obs*Squared*. Dengan uji *White* dibandingkan *Obs*Squared* dengan C^2 (*chisquared*) tabel. Jika nilai *Obs*R-Squared* lebih kecil dari nilai C^2 tabel maka tidak ada heteroskedastisitas pada model.

3.8. Definisi Variabel Operasional

1. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik yang tinggal di masing-masing kabupaten di kawasan Danau Toba (satuan jiwa).
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan akumulasi dari penanaman modal dari Warga Negara Indonesia yang diinvestasikan di masing-masing kabupaten di kawasan Danau toba (satuan rupiah).
3. PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata masyarakat di masing-masing kabupaten di kawasan Danau Toba (satuan rupiah).
4. Pengangguran terbuka adalah penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan di masing-masing kabupaten di kawasan Danau Toba (satuan persen).